Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA KERJA

T.A. 2026



KATA PENGANTAR



Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu Ranhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Ranhir Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peratuan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Ranhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Tanjungpinang, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Drs. MUHAMMAD HASBI, M. Si
Pembina Utama Madya/ IV. d
NIP. 19660228 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 12
1.3. Maksud dan Tujuan 14
1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA **17**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 29
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 31
2.4. Review Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **47**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran 56
3.3 Program dan Kegiatan 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **62**

BAB VI PENUTUP **67**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 22
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau 30
Tabel 2.3. Review Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 32
Tabel 2.4. Usulan Program, Kegiatan Musrenbang Tahun 2025 42

Tabel 3.1. Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 53
Tabel 3.2. Sandingan Perencanaan 57
Tabel 3.3. Sandingan Tujuan dan Sasaran dengan Program Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 60

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau 9

Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja..... 10

Gambar 3.1. RIPB 2020-2044 49
Gambar 3.2. Visi dan Misi PB RIPB 2020-2044 50
Gambar 3.3. Kerangka Analisis Perumusan Tujuan dan Sasaran..... 57

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraian tugas fungsi serta struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Kepala BPBD dijabat rangkap (*ex-efficio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Uraian dan Rincian tugas pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas :

a) Perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c) Pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

d) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
f) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
g) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
h) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
i) Perumusan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
j) Pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/ daerah, arsip dan dokumentasi,hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang, adapun rincian tugas sekretariat antara lain :

a) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait program, keuangan, umum dan kepegawaian;
b) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c) Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
d) Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;

e) Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
g) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
i) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan barang
k) Penyiapan bahan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
m) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun rincian tugas adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

a) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
b) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
d) Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
e) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,

penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
c) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efesien;
e) Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencanan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
f) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
g) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
h) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
b) Penyiapan dan pelaksanaan Pencegahan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

c) Penyiapan bahan pengembangan dan peringatan dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
d) Penyiapan bahan penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
e) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung kebencanaan;
f) Pelaksanaan dan persiapan bimbingan dan penyuluhan kewaspadaan terhadap bencana;
g) Penyiapan bahan melaksanakan Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
h) Penyiapan bahan melaksanakan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
i) Pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan;
b) Penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian TIM Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana;
c) Pemberian pertolongan terhadap korban dilokasi bencana dan mengevakuasi korban ke daerah aman;

d) Pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut serta mengkordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
e) Pengkoordinasian perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);
f) Pelaksanaan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
g) Pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
h) Pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
i) Penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
j) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
k) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
l) Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor;
m) Pemberian dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat serta memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);
n) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan logistik;
o) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan peralatan;
p) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Peralatan; dan
q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

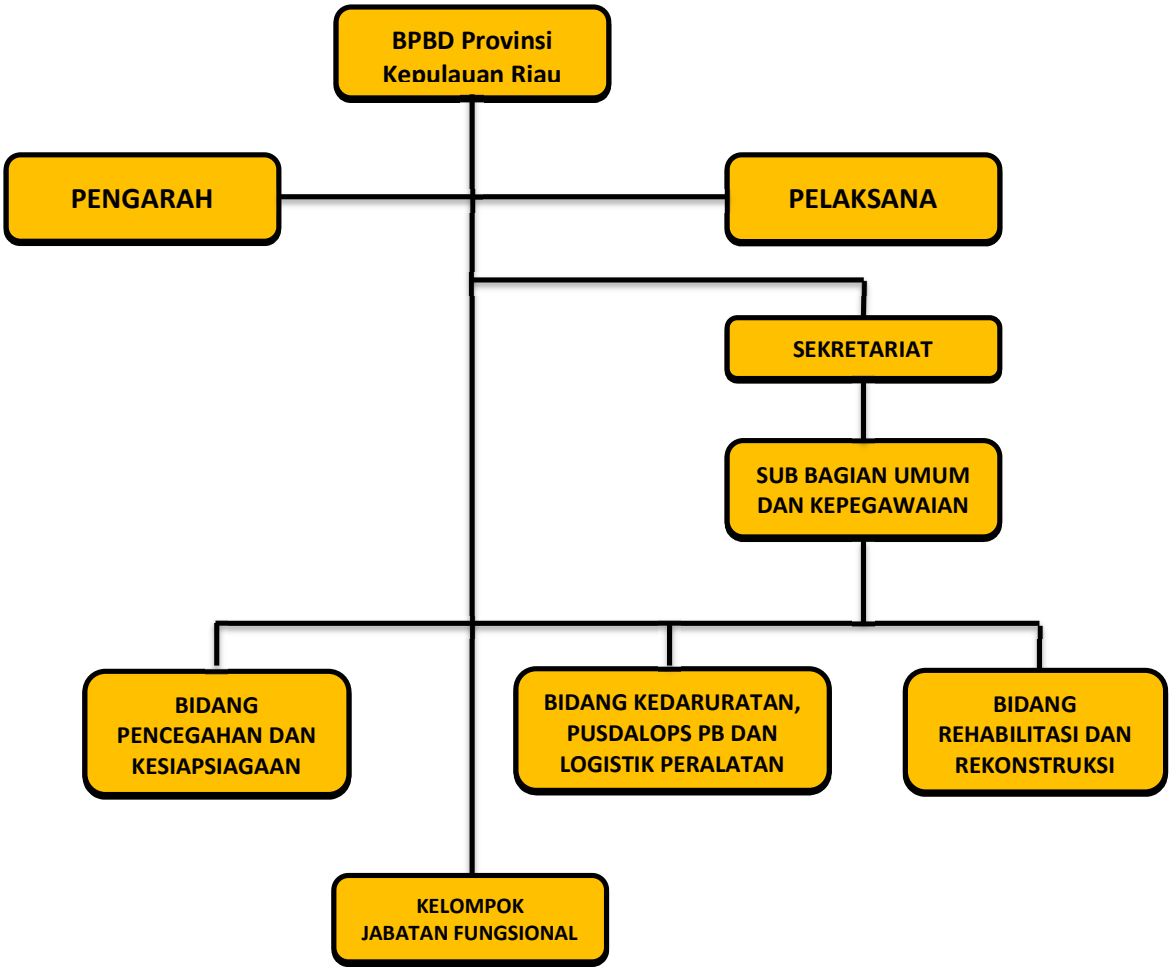
a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi
b) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana; dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
c) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
d) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanakan kebijakan;
e) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

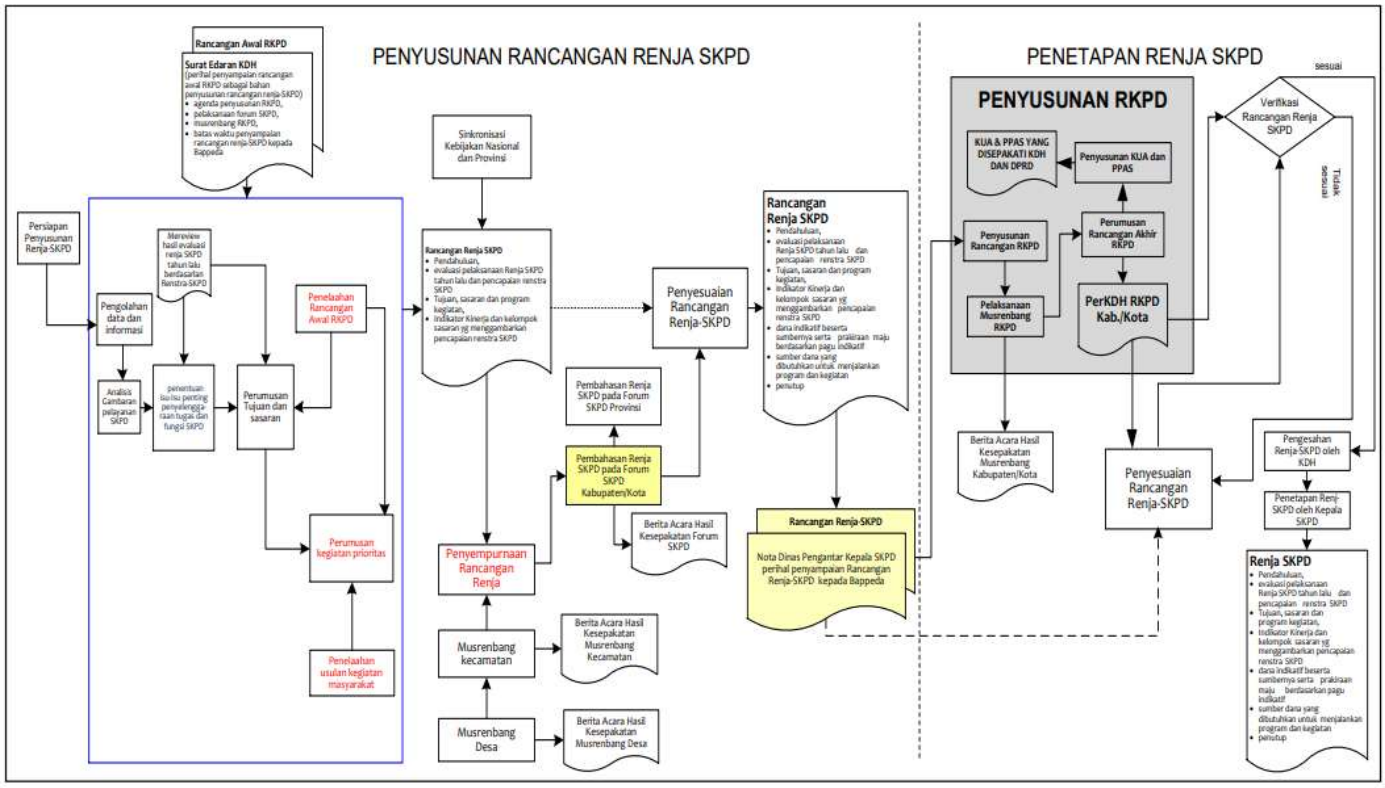
Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau



Sumber Data
Lampiran X : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029. Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu

"KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA".

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi KE 5 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu

"MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN".

Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 yaitu **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN DAERAH"** dengan Sasaran untuk mencapai tujuan adalah **"RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM"**

BPBD Provinsi Kepulauan Riau merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang di tuangkan dalam RENSTRA BPBD

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RENJA BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Tujuan

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2026.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkata Daerah

Bab ini berisi tentang Faktor petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan; rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026.

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 10.690.704.773,-** *(sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga rupiah),* dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang *Terserap* sebesar **Rp.10.566.225.571,36-** (*sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh enam Rupiah),* atau sebesar **98,84 %** untuk realisasi Keuangan dengan kategori Sangat Tinggi **(ST)** dan sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar **98,92 %** Kategori Kinerja Sangat `Tinggi **(ST)** dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah **104,65 %** Kategori Kinerja Sangat Tinggi **(ST)**.

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2024 yaitu Indeks Ketahanan Daerah **104,65 % terdiri dari 3 indeks**:

a. Indeks Pencegahan Bencana;

   Target Indikator Indeks Pencegahan Bencana Tahun 2024 yaitu 2,40 dengan Capaian 2,69 atau 112,08 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Pencegahan Bencana melebihi target di karenakan pencapaian penyusunan dokumen pencegahan bencana Provinsi serta Kabupaten/ Kota mampu terselesaikan;

b. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2024 yaitu 0,32 dengan Capaian 0,27 atau 84,38 % dengan kategori Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Belum memenuhi target di karenakan Dokumen Rencana Kotijensi, Gladi Kesiapsiagaan serta Aktivasi Sistem Komando yang merupakan SPM Sub urusan Kebencanaan belum dapat di laksanakan.

c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan;
Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2024 yaitu 0,42 dengan Capaian 0,53 atau 126.19 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan melebihi target di karenakan BPBD selaku Koordinator Urusan Kebencanaan mampu menyelesaikan Dokumen serta pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana Alam yang terjadi Sepanjang tahun 2024;

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang indikator capaiannya tidak terlaksana yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, hal ini di karenakan Penganggaran terhadap sub kegiatan tersebut sudah tersedia namun terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada belanja Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Daftar program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi:
   A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
      1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
         - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
         - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan/ Material;
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
   - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
   - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
   - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
   - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
   - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
   - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
   - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
   - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
   - Penanganan Pasca Bencana Provinsi;
   - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi;
   - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi;
   - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
   - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota.

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
   a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.

b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum dari awal Renstra Priode 2021 - 2026, dengan capaian pada seluruh kegiatan belum dapat tercapai sesuai apa yg ditargetkan, hal ini di karenakan kurangnya dukungan penganggaran sehingga beberapa dokumen kebencanaan tidak dapat terlaksana.

4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 adalah perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja kedepannya.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d 2024 terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	100	99,09	100	99,09	99,09	100	100	99,88
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	3	3	3	100	3	6	54,54
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	3	3	3	100	2	6	75
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2	1	1	100	1	3	60
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2	4	4	100	2	6	50
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	9	2	3	3	100	2	5	55,55
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	24	24	24	24	100	59	24	100

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	2	1	1	100	2	3	50
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	0	1	1	0	0	1	20
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	0	0	0	0	1	50
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	2	0	0	0	0	2	50
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	2	0	0	0	0	2	25
1	05	01	1.05	00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,66
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100	0	2	66,66
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	2	40
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100	1	2	66,66
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100	1	2	66,66
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	2	40

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	1	2	2	100	1	3	100
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	2	2	100	1	3	50
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	66,66
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	6	2	2	2	100	2	6	66,66
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,66
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	2	2	2	100	2	4	66,66
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan danperlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	3	1	1	1	100	0	2	66,66
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	6	1	2	2	100	1	3	50
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,66
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	22	22	100	22	22	100
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	37	37	29	29	100	17	29	78,37
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	100	1	2	100

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	3,00	2,66	2,40	2,69	112,08	2,69	2,66	89,67
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,35	0,27	0,32	0,27	84,38	0,27	0,48	77,14
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,45	0,64	0,42	0,53	126,19	0,53	0,42	117,78
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	20
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	Orang	1250	600	60	0	0	0	600	48
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen	25	6	4	4	100	4	10	40
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	7	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	120	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	7	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	Kegiatan	5	1	0	0	0	1	1	20

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	117	22	22	22	100	0	44	37,61
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	250	48	63	63	100	10	111	44,44
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	4	1	2	2	100	1	3	75
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	220	40	40	40	100	40	80	36,36
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Domunen	17	3	4	4	100	4	7	41,17
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencanaoperasi kedaruratan yang sah/ legal	Domunen	2	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	5	0	1	1	0	1	1	20
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	50	0	0	0	0	0	25	50,00
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1600	460	300	300	100	100	760	47,50

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03	1.03	0029	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	0	1	0	0	100	0	1	50,00
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	12	4	4	4	100	2	8	66,66
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	0	1	1	100	1	1	20
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen	28	3	5	5	100	2	8	28,57
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	90	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	8	3	4	3	100	1	7	87,50
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	3	0	1	1	100	1	1	33,33
1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	60	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Orang	240	0	40	40	100	0	40	16,66

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja-RENSTRA	Realisasi Target Kinerja s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2024			Target 2025	Perkiraan Capaian Target s/d 2025	
										Target	Realisasi	Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)									
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	2	0	0	0	0	2	50,00
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	5	2	0	0	0	0	2	40
1	05	03	1.04	0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	40	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	4	0	1	1	100	0	1	25,00
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten/ Kota	7	7	3	3	100	0	3	42,85

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari Capaian Indikator Kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Priode 2021-2026 kemudian di tuangkan dalam Restra OPD, dari empat (4) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai dari hingga tahun 2024 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa Sub-Urusan Bencana yang belum terlaksana, antara lain:

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman);
   Sub Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada belanja Tahun Anggaran 2024.
2. Pembuatan Rencana Kontijensi;
   Pembuatan Dokumen Kontijensi Belum dapat di laksanakan dikarenakan terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada belanja Tahun Anggaran 2024.
3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
   Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Kontijensi (renkon) sudah tersedia.
4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana;
   Akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Rencana 100, Realisasi 100 (100 %) Sangat Tinggi, telah mencapai target.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	SPM/ Stndar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Proyeksi		
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 SAKIP	Nilai	71,05	76,00	78,00	80,00	73,20	73,20	73,70	Dinilai Oleh Inspektorat
2.	Indeks Pencegahan Bencana	Permendagri 101 Tahun 2018 SPM Sub Urusan Bencana	Indeks	2,46	2,60	2,80	3,00	2,69	2,69	2,69	Dinilai Oleh BNPB
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			0,30	0,32	0,33	0,35	0,27	0,27	0,27	
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana			0,40	0,42	0,43	0,45	0,53	0,53	0,53	

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
   1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
   2) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
   3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
   5) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
   6) Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;

b. Tantangan dalam menurunkan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memilki tantangan untuk mendorong dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
   1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
   2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
4) Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangkauan yang sangat luas;
5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
6) Memiliki potensi bencana iklim yang sangat besar.

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/ kegiatan kebencanaan;
3) Adanya dukungan dari lembaga/ instansi pemerintahan yang terkait;
4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
5) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 terdapat perubahan signifikan, hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Provinsi

Kepulauan Riau menyesuaikan pada Rencana Strategis Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat meningkatkan serta mampu menjalankan beberapa Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 merupakan Perubahan Ketiga atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel. 2.3.
Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**100 %**	**9.673.203.064**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**100%**	**9.673.203.064**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	292.203.064	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	292.203.064
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	142.203.064	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	142.203.064
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.100.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.100.000.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	5.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	5.700.000.000
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2 Dokumen	350.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2 Dokumen	350.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Riau	Pelaksanaan Tugas ASN				Riau	Pelaksanaan Tugas ASN		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	50.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	150.000.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	50.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	580.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	580.000.000
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	30.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	10.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Riau	yang Disediakan				Riau	yang Disediakan		
e	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	70.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	320.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	320.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	160.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	160.000.000
a	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	160.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	160.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.911.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.911.000.000
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.726.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.726.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	480.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	480.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	200.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	40.000.000
d	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	240.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	240.000.000
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Indeks Pencegahan Bencana**	**3,00**	**14.188.094.771**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Indeks Pencegahan Bencana**	**3,00**	**14.188.094.771**
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	**0,35**				**Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana**	**0,35**	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	**0,64**				**Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana**	**0,64**	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	1.338.094.771	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	1.338.094.771
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	700 Orang	1.038.094.771	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Seluruh Kab/ Kota	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	700 Orang	1.038.094.771
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	300.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	Provinsi Kepulauan	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan	10 Dokumen	6.400.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	Provinsi Kepulauan	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan	10 Dokumen	6.400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bencana	Riau	Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Bencana	Riau	Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	800.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kab. Natuna, Kab, Kep. Ananbas, Kab. Karimun, Kab. Lingga, Tanjungpinang dan Batam	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	800.000.000
b	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	60 Orang	400.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	60 Orang	400.000.000
c	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kab. Natuna dan Kab, Kep. Ananbas	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	300.000.000
d	Penyusunan Rencana Kontijensi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana KontinjensiYang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	3 Dokumen	800.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Natuna, Kep. Ananbas dan Bintan	Jumlah Dokumen Rencana KontinjensiYang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	3 Dokumen	800.000.000
e	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	2 Kegiatan	500.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	2 Kegiatan	500.000.000
f	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	70 Orang	800.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	70 Orang	800.000.000
g	Penyediaan Peralatan	Provinsi	Jumlah keluarga yang	110	1.300.000.000	Penyediaan Peralatan	Provinsi	Jumlah keluarga yang berada	110	1.300.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kepulauan Riau	berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga		Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kepulauan Riau	di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	
h	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	300.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	300.000.000
i	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	400.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	400.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7 Dokumen	2.800.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7 Dokumen	2.800.000.000
a	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/ legal	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/ legal	1 Dokumen	300.000.000
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	200.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	200.000.000
c	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam	25 Orang	300.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam	25 Orang	300.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			aspek manajerial dan teknis					aspek manajerial dan teknis		
d	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	700 Orang	1.000.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	700 Orang	1.000.000.000
e	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	500.000.000	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	500.000.000
f	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	200.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	200.000.000
g	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Laporan	200.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Laporan	200.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11 Dokumen	3.650.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11 Dokumen	3.650.000.000
a	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	400.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Natuna, dan Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	400.000.000
b	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	4 Dokumen	950.000.000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	4 Dokumen	950.000.000
c	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	150.000.000	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	150.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
d	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	30 Lembaga	150.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	30 Lembaga	150.000.000
e	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	400.000.000
f	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	400.000.000
g	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	100.000.000
h	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	300.000.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	300.000.000
i	Peningkatan Kapasitas SDM	Provinsi	Jumlah SDM aparatur	20 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM	Provinsi	Jumlah SDM aparatur	20 Orang	200.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kepulauan Riau	penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi			Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kepulauan Riau	penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi		
J	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen	400.000.000	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen	400.000.000
k	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) tahun	7 Kabupaten/ Kota	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) tahun	7 Kabupaten/ Kota	200.000.000
				TOTAL	23.861.297.835				TOTAL	23.861.297.835

Tabel. 2.4.
Usulan Program, Kegiatan Musrenbang Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Indeks Pencegahan Bencana**	**3,00**	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	**0,35**	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	**0,64**	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	

a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bintan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	70 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		70 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		70 Orang	
		Kabupaten Karimun		70 Orang	
		Kabupaten Lingga		70 Orang	
		Tanjungpinang		75 Orang	
		Batam		75 Orang	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Dokumen	
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Natuna	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kab. Kep. Anambas		1 Kawasan	
		Kabupaten Karimun		1 Kawasan	
		Kabupaten Lingga		1 Kawasan	
		Tanjungpinang		1 Kawasan	
		Batam		1 Kawasan	
b	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kabupaten Natuna	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	BPBD Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas
		Kab. Kep. Anambas		1 Dokumen	
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Natuna	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	BPBD Kab. Natuna, Kab. Kep. Anambas dan Kab. Bintan
		Kab. Kep. Anambas		1 Dokumen	
		Kabupaten Bintan		1 Dokumen	
d	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	3 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		3 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		3 Orang	

		Kabupaten Karimun		3 Orang	
		Kabupaten Lingga		3 Orang	
		Tanjungpinang		3 Orang	
		Batam		3 Orang	
e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40 keluarga	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		40 keluarga	
		Kab. Kep. Anambas		40 keluarga	
		Kabupaten Karimun		40 keluarga	
		Kabupaten Lingga		40 keluarga	
		Tanjungpinang		40 keluarga	
		Batam		40 keluarga	
f	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	3 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		3 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		3 Orang	
		Kabupaten Karimun		3 Orang	
		Kabupaten Lingga		3 Orang	
		Tanjungpinang		3 Orang	
		Batam		3 Orang	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Dokumen	
a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Kabupaten Bintan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	2 orang	BPBD se-Provinsi

	Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Kabupaten Natuna	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 orang	Kepulauan Riau
		Kab. Kep. Anambas		2 orang	
		Kabupaten Karimun		2 orang	
		Kabupaten Lingga		2 orang	
		Tanjungpinang		2 orang	
		Batam		2 orang	
b	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	85 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		85 orang	
		Kab. Kep. Anambas		85 orang	
		Kabupaten Karimun		85 orang	
		Kabupaten Lingga		85 orang	
		Tanjungpinang		85 orang	
		Batam		85 orang	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11 Dokumen	
a	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bintan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	BPBD Kab. Natuna, Kab. Bintan dan Tanjungpinang
		Kabupaten Natuna		20 Keluarga	
		Tanjungpinang		20 Keluarga	
b	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	10 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		10 orang	
		Kab. Kep. Anambas		10 orang	
		Kabupaten Karimun		10 orang	

		Kabupaten Lingga	(R3P)	10 orang	
		Tanjungpinang		10 orang	
		Batam		10 orang	
c	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	2 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		2 orang	
		Kab. Kep. Anambas		2 orang	
		Kabupaten Karimun		2 orang	
		Kabupaten Lingga		2 orang	
		Tanjungpinang		2 orang	
		Batam		2 orang	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dan misi seluruh Kementerian / Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

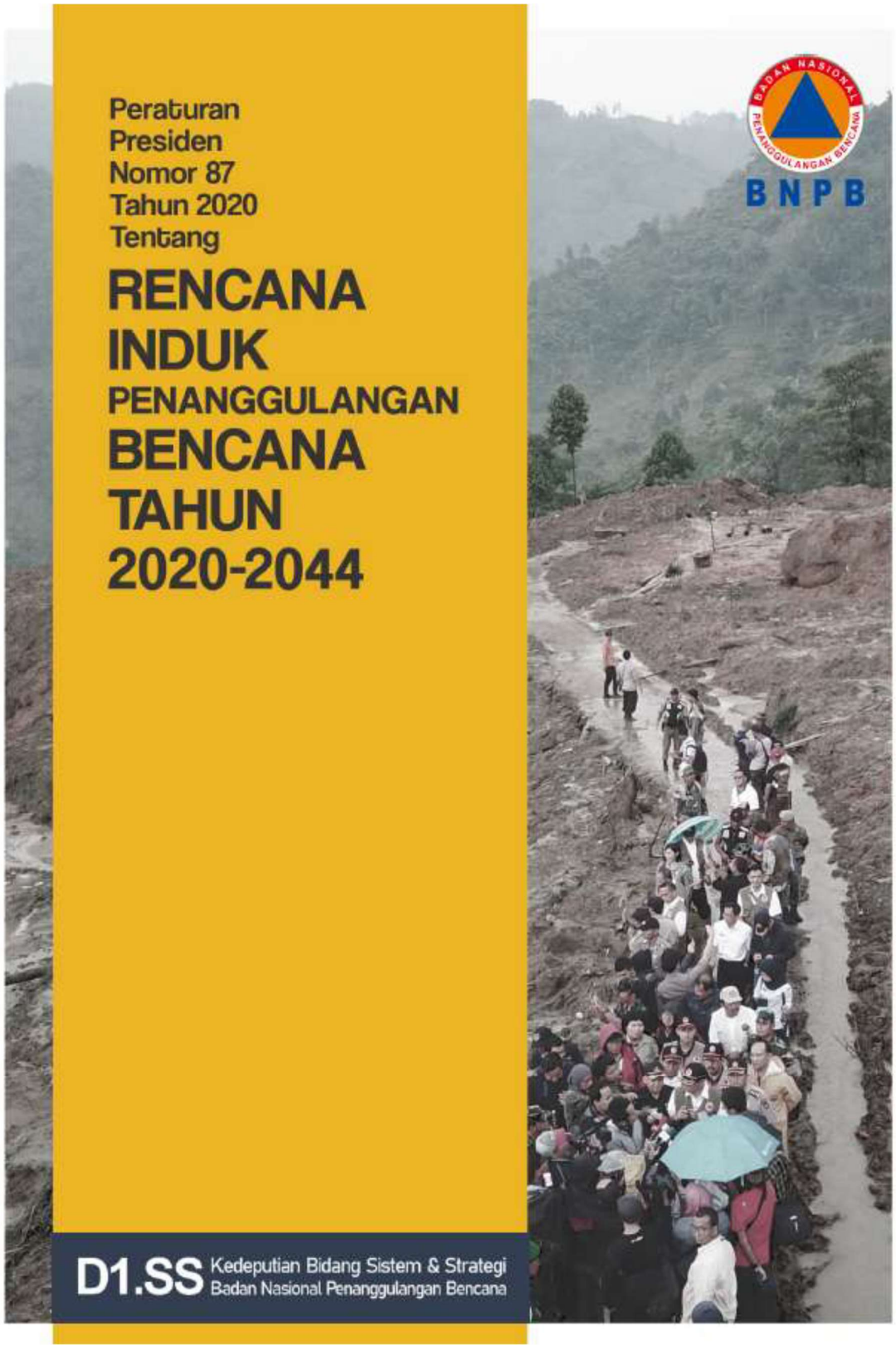
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kebijakan terkait dengan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 secara utama dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-5 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

3.1.2 Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diturunkan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun.

Gambar 3.1
RIPB 2020-2044



Gambar 3.2
Visi dan Misi PB RIPB 2020-2044



Tujuan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diturunkan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana;
2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana;
3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transpararan, dan akuntabel;
4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;

5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:

1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
2) Peningkatan sinergi antar Kementerian /lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan;
4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal;
6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Fokus Capaian RIPB Periode II 2025-2029:

1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4) Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi peru-bahan iklim;

7) Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
9) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profe-sional di bidang kebencanaan;
11) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
12) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan Tangguh bencana.

3.1.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB) Tahun 2025-2045 adalah pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan turunan RIPB 2020-2044.RENAS PB disusun dan ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, baik untuk pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah dan masyarakat. RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat.

Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dan bagian dari Perencanaan Pembangunan. Perspektif pengurangan risiko dan

pengembangan ketangguhan juga dimasukkan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, Pembangunan perkotaan, dan daerah pascabencana. Salah satu sasaran khususnya Adalah menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi.

Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini dituangkan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai garis dasar bagi perencanaan bencana selanjutnya. Berikut adalah fokus capaian RIPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.

Tabel. 3.1.
Fokus Capaian 2025-2029
dalam Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penguatan peraturan perundang – undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman. 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemahaman
2.	Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, Lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan	

		yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip- prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana. c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan persisir yang berisiko bencana.
4.	Penguatan tata Kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pelaku penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata Kelola penanggulangan bencana untuk	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh

		meningkatkan akuntabilitas. e. Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang Tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan.	bencana.
5.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatanan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	
6.	Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.	

	untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	b. Meningkatkan kualitas penghidupan Masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

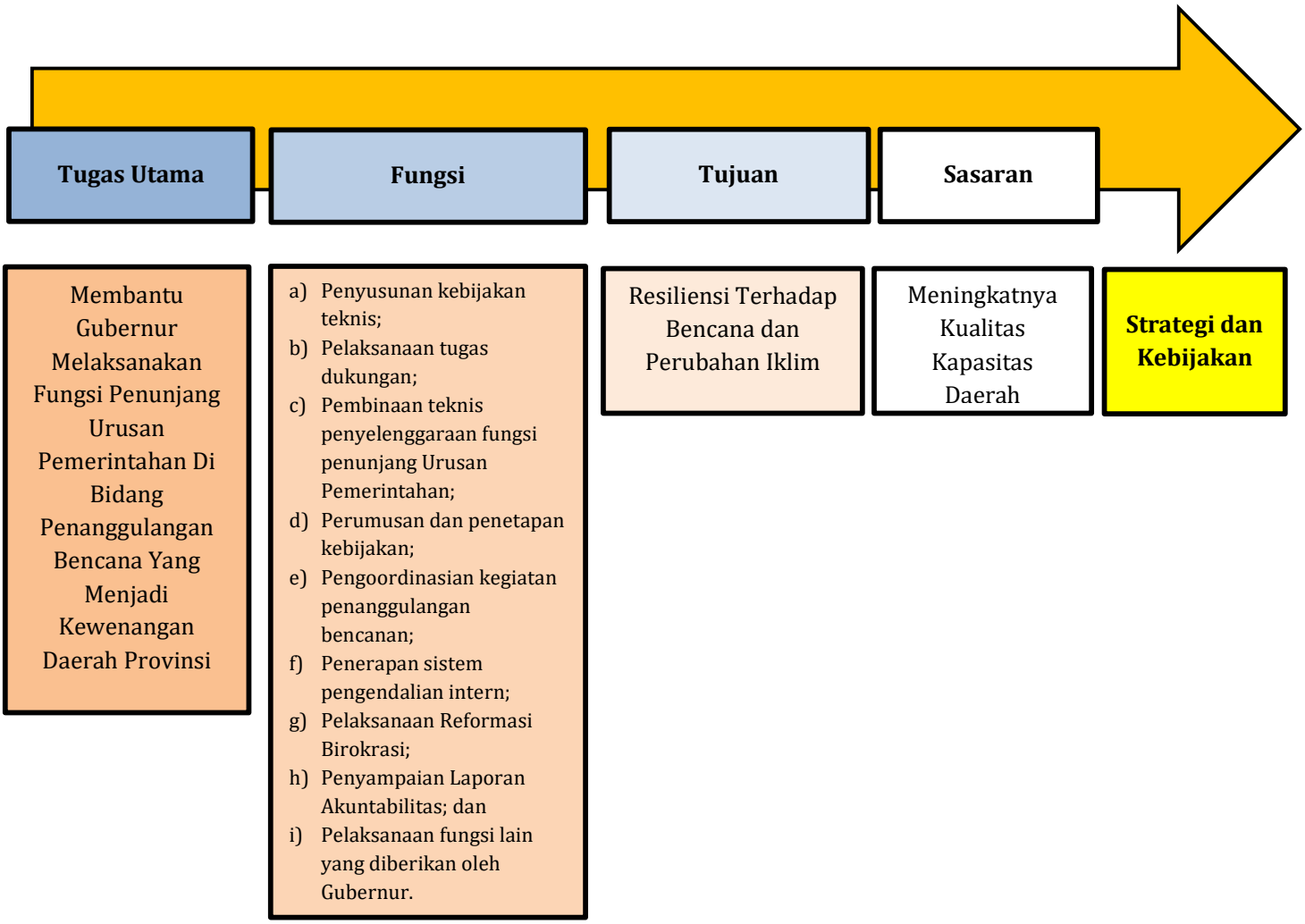
3.2 Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Upaya dalam pencapaian tujuan serta sasaran kinerja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dalam pembangunan Daerah.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat direncanakan dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

Gambar 3.3
Kerangka Analisis Perumusan Tujuan dan Sasaran



Tabel. 3.2.
Sandingan Perencanaan

Visi **KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA**
Misi 5 **MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
Tujuan RPJMD 5.2 **MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN DAERAH**
Sasaran RPJMD 5.2.2 **RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM**

RENJA 2026 BPBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim **Indikator Tujuan** Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah **Indikator Sasaran** Indeks Ketahanan Daerah	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Pengelola, Pemberdayaan Masyarakat dan Regulasi dalam Penanggulangan Bencana.	1. Memfasilitasi pembentukan dan penerapan Desa Tangguh Bencana melalui penyediaan tenaga fasilitator; 2. Peningkatan kapasitas Forum PRB dan Relawan Penanggulangan Bencana di Kab/ Kota; 3. Memberi pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan non ASN dalam PB; 4. Melakukan Sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dengan PUSDALOPS; 5. Menyusun Regulasi dan dokumen KRB, RPB, dan PRB serta Renkon per jenis bencana; 6. Melakukan inventarisir bersama lintas sektoral dan bersinergi serta berkolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana; 7. Penguatan Kebijakan Daerah tentang RPB dan Peraturan tentang Penanggulangan Bencana daerah; 8. Melakukan pendidikan, pelatihan, sosialisasi , tentang pencegahan dan

			kesiapsiagaan bencana yang melibatkan unsur lintas sektor/ pentahelix.
		Tersedianya Logistik, Peralatan dan Personil TRC dalam Penanggulangan Bencana.	1. Melaksanakan Pengutan Pentahelix Bersama Stake Holder Terkait Untuk Penyediaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 2. Peningkatan Kapasitas TRC Penanggulangan Bencana termsuk TRC Lintas Sektor.
		Optimalisasi Sistem Pemulihan Pasca Bencana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.	1. Mengembangkan sistem pendataan digital terintegrasi; 2. Membentuk forum koordinasi penanggulangan bencana dan SOP yang jelas; 3. Membentuk dana cadangan daerah untuk bencana dan mendorong alokasi minimal di APBD; 4. Mengintegrasikan PRB dengan rencana aksi daerah perubahan iklim; 5. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
		Meningkatknya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja,	Peningkatan Kualitas melalui Pendidikan serta pelatihan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja,

		Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian serta Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian serta Tata Kelola Pemerintahan

Tabel. 3.3.
Sandingan Tujuan dan Sasaran dengan Program Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target Indikator Tujuan/ Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkap Daerah (Predikat)	BB
						Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	88
						Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,75
		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,47	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	2,72
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,29
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,55

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kepulauan Riau 2025 – 2025

dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator-indiaktor yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029.

Pada Ranhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi kepulauan Riau tahun 2026 ini terdapat 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, Ranhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan total keseluruhan sebesar **Rp.11.334.051.440,52- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma lima puluh dua rupiah)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, Khusus Gaji ASN dan PPPK dibebankan kepada APBN/ Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, Berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra dan RPJMD Merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Analisa kebutuhan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pagu RKPD 2026	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
VISI : KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA							
MISI 5 : MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
TUJUAN RPJMD 5.2 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN DAERAH				**PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)**			
	SASARAN RPJMD 5.2.2 : RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN			**INDEKS RISIKO BENCANA**	**Indeks**		
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**108,00**	**11.334.051.440,52**
	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah			**Indeks Ketahanan Daerah**	**Angka**	**0,47**	**11.334.051.440,52**
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkap Daerah**	**Nilai**	**73,70**	**9.334.051.440,52**
		1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**220.000.000,00**
		1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	120.000.000,00
		1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	50.000.000,00
		1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	50.000.000,00
		1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**8.059.051.440,52**
		1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	59	7.834.051.440,52
		1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2	175.000.000,00
		1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	2	50.000.000,00
		1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**70.000.000,00**
		1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000,00
		1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	20.000.000,00
		1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	3	20.000.000,00
		1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**280.000.000,00**
		1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	15.000.000,00
		1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.000.000,00
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000,00
		1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1	15.000.000,00
		1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	7.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pagu RKPD 2026	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	216.000.000,00
		1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen**	**1**	**155.000.000,00**
		1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	155.000.000,00
		1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**290.000.000,00**
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	210.000.000,00
		1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	80.000.000,00
		1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**260.000.000,00**
		1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	150.000.000,00
		1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	20.000.000,00
		1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000,00
		1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	70.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pagu RKPD 2026	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
							2.000.000.000,00
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Pencegahan Bencana**	**Indeks**	**2,69**	**220.000.000,00**
				Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	**Indeks**	**0,27**	**1.120.000.000,00**
				Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	**Indeks**	**0,53**	**660.000.000,00**
		1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000,00**
		1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	Orang	60	100.000.000,00
		1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Dokumen**	**6**	**657.500.000,00**
		1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	1	245.000.000,00
		1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani	Kegiatan	1	20.000.000,00
		1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	40	170.000.000,00
		1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	50	72.500.000,00
		1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	2	50.000.000,00
		1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	60	100.000.000,00
		1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Dokumen**	**6**	**582.500.000,00**
		1.05.03.1.01.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1	10.000.000,00
		1.05.03.1.01.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	2	70.000.000,00
		1.05.03.1.01.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Laporan	1	10.000.000,00
		1.05.03.1.01.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	170	390.000.000,00
		1.05.03.1.01.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	4	82.500.000,00
		1.05.03.1.01.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	20.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pagu RKPD 2026	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Dokumen**	**7**	**660.000.000,00**
		1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	40	70.000.000,00
		1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	180.000.000,00
		1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	45.000.000,00
		1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	50	250.000.000,00
		1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	1	40.000.000,00
		1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	7	25.000.000,00
		1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	1	50.000.000,00
					TOTAL Anggaran		**11.334.051.440,52**

BAB V
PENUTUP

Rancanagan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder penanggulangan bencana dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan tangguh bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/ kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk menyukseskan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, September 2025
Perencana Ahli Muda